

Bab I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Pembangunan juga merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental yang sudah terbiasa. (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005). Termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan atau kondisi ekonomi, pengurangan ketimpangan serta pemberantasan kemiskinan yang absolut. Salah satu kebijakan pemerintah untuk mempersempit kesenjangan regional adalah diterapkannya kebijakan pembangunan daerah yang dilakukan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah (Rahman Y.A dan Ayunda Lintang Chamelia 2014).

Pembangunan regional merupakan pelaksanaan dari pembangunan nasional pada wilayah tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi regional tersebut. Pembangunan ekonomi daerah dapat dikatakan sebagai suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Pemerintah membuat suatu kebijakan untuk mengurangi kesenjangan regional dengan membuat kebijakan pembangunan berdasarkan potensi dan keunggulan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pemerintah Pusat melakukan kebijakan otonomi daerah dengan tujuan untuk memaksimalkan sumber daya ekonomi sehingga dapat meningkatkan perekonomian di daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian nasional.

Ketika sebuah Negara melakukan sebuah pembangunan ekonomi pada dasarnya adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses, bukan merupakan suatu gambaran ekonomi pada suatu periode tertentu, ada perkembangan atau perubahan dan penggunaan waktu (Boediono,1999).

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan pertumbuhan output yang dibentuk melalui berbagai sektor ekonomi sehingga dapat mengetahui apakah adanya peningkatan ataupun penurunan yang telah dicapai oleh sektor ekonomi pada suatu periode waktu tertentu. Begitu juga pada pembangunan di daerah tujuan utamanya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang dimaksudkan untuk mendorong, memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka membangun daerahnya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan daerah meliputi berbagai bidang, salah satunya pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad,1999). Agar tercapainya pembangunan tersebut, dibutuhkan perencanaan pembangunan yang baik (Kusumaningsih W 2009).

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah, nilai PDRB akan menjelaskan bagaimana kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah tersebut. Selain itu, kondisi perekonomian secara keseluruhan di setiap daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar jumlah belanja daerah pada daerah

bersangkutan. Pengeluaran pemerintah atau belanja daerah merupakan bentuk rangsangan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perekonomian daerah. Semakin besar nilai belanja daerah yang dialokasikan untuk pembangunan, maka akan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Ini berarti kondisi ekonomi di daerah tersebut juga akan meningkat. Pada kenyataannya, masih banyak ditemukan daerah yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembangunan ekonominya setelah pelaksanaan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan mengelola pembangunan daerahnya masing-masing berdasarkan potensi dan sumberdaya yang ada di wilayah yang bersangkutan (Rahman Y.A dan Ayunda Lintang Chamelia 2014). Strategi yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada yaitu salah satunya strategi menyangkut peran pemerintah dalam perekonomian yaitu termasuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), kredit bank, dan tabungan yang digunakan untuk membiayai proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pendapatan perkapita terbesar di Sumatera adalah salah satunya Provinsi Jambi mencapai 49,64 juta pertahun. Hal tersebut didukung oleh (Syaparuddin, Zulgani 2015) yang menyatakan bahwa selama 2010-2014 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi selalu lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2010 sebesar 7,31%, tahun 2011 meningkat menjadi 8,54%, kemudian tahun 2012 sebesar 7,44%, kemudian meningkat menjadi 7,88% pada tahun 2013. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2014 sebesar 7,93% dan merupakan pertumbuhan tertinggi di Sumatera dan tertinggi kedua di Indonesia setelah Sulawesi Barat (8,73%). Sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2014 hanya 5,02%. Dimana peneliti ini meneliti mengenai analisis pertumbuhan ekonomi dan

PAD Provinsi Jambi. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB Perkapita dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jambi tahun 2000-2014. Serta Penanaman Modal Dalam Negeri dan Tenaga Kerja berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

Sementara itu Sumatera Barat pendapatan perkapita nya sebesar 37,21 juta per tahun. Untuk provinsi yang memiliki pendapatan perkapita terendah adalah Provinsi Bengkulu (Utari Antika S 2015).

Ada beberapa peneliti yang meneliti bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Tabungan, Kredit mempengaruhi PDRB di suatu daerah, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh (Yozi Aulia Rahman, Ayunda Lintang Chamelia, 2014) yang meneliti Faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2008-2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel tabungan dan kredit berpengaruh signifikan, sedangkan variabel PAD, dan Belanja Daerah tidak signifikan terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008–2012. Variabel PAD tidak signifikan dapat disebabkan karena Desentralisasi fiskal memungkinkan para pemimpin daerah untuk melakukan korupsi pada level lokal / daerah.

Selanjutnya penelitian yang sama tetapi memiliki hasil yang berbeda dilakukan oleh (Widya Kusumaningsih, 2012) yang meneliti Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB di Jawa tengah tahun 2009. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel kredit dan belanja daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PDRB sedangkan variabel PAD, Tabungan dan Kepadatan Penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Hendry Sulaiman Nasution, 2010) yang meneliti Analisis Faktor – faktor yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB era desentralisasi fiskal di provinsi banten periode 2001-2009. Hasil penelitian ini

menunjukkan ada 3 variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan produk domestik regional bruto propinsi banten pada tahun 2001-2009. Ketiga variabel tersebut adalah Inflasi, Penanaman Moda Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sedangkan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi hasil, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan produk domestik regional bruto propinsi banten pada tahun 2001-2009.

Sumatera Barat (Sumbar) sebagai salah satu daerah otonom juga sedang mengalami suatu proses pembangunan ekonomi. Sumatera Barat (Sumbar) melalui tahun 2017 dengan ekonomi relatif stabil dibandingkan 2016. Berdasarkan paparan Bank Indonesia, perekonomian Sumbar tahun 2017 ini mengalami penguatan. Akan tetapi pada tahun 2018 Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat (Sumbar) masih mengalami perlambatan. Dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, ekonomi di Ranah Minang hanya tumbuh 5,08 persen pada kuartal II 2018 secara tahun ke tahun (yoy). Dibandingkan dari beberapa provinsi di pulau Sumatera provinsi Sumatera Barat berada di peringkat kelima dalam raihan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2018 (Jawa Pos).

Untuk itu peneliti ingin mengetahui bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah Tabungan dan Kredit apakah dapat mempengaruhi pendapatan perkapita/ PDRB di Sumatera Barat bisa meningkat.

Berdasarkan data BPS Sumatera Barat, PDRB Sumatera Barat dari tahun 2013-2015 mengalami kenaikan. Berikut data PDRB Sumatera Barat beberapa tahun terakhir :

Tabel 1.1
PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Barat atas dasar harga konstan tahun 2000
periode 2013-2016 (dalam milyar rupiah)

Tahun	Jumlah
2013	125,940
2014	133,340

2015	140,704
2016	148,110

Sumber BPS, Sumatera Barat dalam angka 2013-2016

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut dapat dilihat angka PDRB tiap tahunnya di Provinsi Sumatera Barat atas dasar harga konstan tahun 2000 mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2015 berada pada angka 140,704 dan di tahun 2016 148,110. Berikut ini merupakan data variabel independent PAD, Belanja daerah, di Sumatera Barat beberapa tahun terakhir yaitu tahun 2013-2016. :

Tabel 1.2
Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah Sumatera barat
tahun 2013-2016 (dalam milyar rupiah)

	2013	2014	2015	2016
Pendapatan Asli Daerah	1,366,178	1,729,222	1,876,733	1,964,148
Belanja Daerah	3,113,313	3,483,672	4,022,256	4,774,203

Sumber BPS, Sumatera Barat dalam angka 2013-2016

Pada data diatas dapat dilihat angka PAD dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan setiap tahunnya. Untuk data PAD tahun 2013 berada pada angka 1,366,178 dan tahun 2014 1,729,222. Kondisi ini terus meningkat hingga tahun 2016 1,964,148. Belanja daerah Sumatera Barat juga terus mengalami kenaikan pada tahun 2013 3,113,313 dan tahun 2014 3,483,672 pada tahun 2016 mencapai 4,774,203. Untuk variabel tabungan dan kredit berikut datanya untuk beberapa tahun terakhir tahun 2013-2016.

Tabel 1.3
Tabungan, Kredit Sumatera barat
tahun 2013-2016 (dalam milyar rupiah)

	2013	2014	2015	2016
Tabungan	12,600	15,300	17,500	18,610
Kredit	37,430	42,800	48,162	49,700

Sumber Bank Indonesia, 2013-2016

Menurut data diatas dapat dilihat angka tabungan dan kredit daerah yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2013 angka tabungan berada pada angka 12,600

dan naik di tahun 2014 menjadi 15,300 . Pada tahun 2015 berada pada 17,500 dan naik tidak terlalu signifikan pada tahun 2016 18,610. Untuk kredit provinsi Sumatera Barat pada tahun 2013 berada pada angka 37,430 dan terus meningkat pada tahun 2016 mencapai 49,700.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PDRB DI PROVINSI SUMATERA BARAT**”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun dalam penelitian ini akan dibahas sebagai berikut :

1. Apakah PAD berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Barat?
2. Apakah Belanja Daerah berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Barat?
3. Apakah Tabungan berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Barat?
4. Apakah Kredit berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh PAD terhadap kondisi PDRB di Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh tabungan terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Barat.
4. Untuk mengetahui pengaruh kredit terhadap PDRB di Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dari informasi yang diperoleh, serta menambah pengalaman peneliti dalam bidang penelitian.\

2. Bagi pemerintah provinsi Sumatera Barat

Sebagai saran tentang kondisi perekonomian di kota/kabupaten Provinsi Sumatera Barat serta permasalahannya.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membuat peneliti lebih terarah maka perlu adanya pembatasan atau ruang lingkup permasalahan, dalam penelitian ini ruang lingkungnya lebih fokus kepada :

1. Variabel dependen yang diteliti adalah Produk Domestik Regional Bruto, variabel independennya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, Tabungan daerah, dan Kredit Daerah.

2. Lokasi penelitian adalah Provinsi Sumatera Barat. menggunakan data mulai dari tahun 2002-2016 (15 tahun).

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Unsur-unsur yang termuat dalam bab ini yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan ruang lingkup, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti. Meliputi teori perdagangan internasional, teori permintaan penawaran dan hal yang dirasa perlu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menguraikan tentang bagaimana data diolah beserta pembahasannya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisi tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah dan dari sini dapat ditarik kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan.

